



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perjalanan Arab Saudi dari
***Rentierism* menuju *Late Rentierism*:**
Globalisasi Nilai dan Pengaruh Tradisional

Skripsi

Oleh

Sultan Madeeba Israel Alnimitz

2014330095

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perjalanan Arab Saudi dari
***Rentierism* menuju *Late Rentierism*:**
Globalisasi Nilai dan Pengaruh Tradisional

Skripsi

Oleh

Sultan Madeeba Israel Alnimitz

2014330095

Pembimbing

Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Sultan Madeeba Israel Alnimitz
Nomor Pokok : 2014330095
Judul : Perjalanan Arab Saudi dari *Rentierism* menuju *Late Rentierism*: Globalisasi Nilai dan Pengaruh Tradisional

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 23 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A. :

Sekretaris

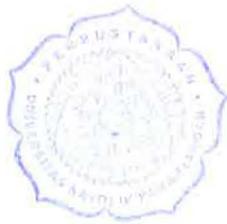
Albert Triwibowo, S.IP., M.A. :

Anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sultan Madeeba Israel Alnimitz
NPM : 2014330095
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Perjalanan Arab Saudi dari *Rentierism* menuju
Late Rentierism: Globalisasi Nilai dan Pengaruh
Tradisional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 7 Agustus, 2018



Sultan Madeeba Israel Alnimitz

2014330095

Abstrak

Nama : Sultan Madeeba Israel Alnimitz
NPM : 2014330095
Judul : Perjalanan Arab Saudi dari *Rentierism* menuju
Late Rentierism: Globalisasi Nilai dan Pengaruh
Tradisional

Globalisasi merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia pada abad ke-21. Arab Saudi merasakan dampak dari globalisasi, baik di bidang politik maupun ekonomi. Pemerintah Saudi yang bergantung pada rent, pemasukan dari sektor minyak, pun dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak di pasar internasional. Menggunakan teori late rentierism, analisis akan dimulai dari pengaruh turunnya harga minyak pada tahun 2014 pada sektor politik dan ekonomi secara umum, kemudian mengerucut pada pengaruh tradisional yang menghambat proses tersebut, hingga identifikasi Arab Saudi sesuai dengan karakteristik late rentier state. Mengacu pada pertanyaan penelitian 'bagaimana globalisasi mengubah Arab Saudi menuju late rentier state?' disimpulkan bahwa globalisasi telah masuk dan berkembang di Arab Saudi, akan tetapi mengingat tersentralisasinya pemerintahan Arab Saudi, implementasi nilai-nilai globalisasi dapat dibatasi hingga di titik di mana hal tersebut dapat menguntungkan Arab Saudi, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Kata kunci: Globalisasi, Integrasi Ekonomi, *Rentierism*, *Late Rentierism*, Arab Saudi

Abstract

Name : Sultan Madeeba Israel Alnimitz
Student ID : 2014330095
Title : Arab Saudi's Journey from *Rentierism* towards
Late Rentierism: Globalised Values and Traditional
Influences

Globalisation develops into one of the world's main concern in the 21st century. Saudi Arabia, as a rentier state – which relies heavily on rent, on of them is oil income – affected gravely by the economic misfortune occurred back in 2014. Oil price plunge which happened in that very year is a conclusive evidence of Saudi's economic interconnectedness with global economy system. Employing late rentierism theory, analysis will be first directed on how the low oil price affect the Kingdom's political and economic sector, which followed by traditional influences that hinder political pluralisation. Ultimately, Saudi Arabia's journey to late rentierism will be explained using the 7 characteristics of late rentier state. Referring to the research question "how globalisation change Saudi Arabia to a late rentier state," it is concluded that globalisation has indeed penetrated and flourished in Saudi, however considering the Kingdom's centralised political system, the government managed to limit its implementation to a certain point where it benefit the Saudi Arabian government in both political and economic sector.

Keywords: Globalization, Economic Integration, Rentierism, Late Rentierism, Saudi Arabia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah dan Yesus Kristus., di mana berkat rahmat-Nya saya telah diberikan kesempatan serta kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya pun tidak lupa untuk turut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi kali ini, terutama Bapak Albert Triwibowo yang senantiasa membimbing dan memberikan saran.

Skripsi yang berjudul “Perjalanan Arab Saudi dari *Rentierism* menuju *Late Rentierism*: Globalisasi Nilai dan Pengaruh Tradisional” disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan bersama. Sebagai penutup, penulis berharap agar penelitian ini mampu memperkaya wawasan pembaca mengenai kajian ilmu hubungan internasional.

Bandung, 7 Agustus 2018

Sultan Madeeba Israel Alnimitz

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pertama, Tuhan dan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing dan melindungi saya selama empat tahun sebagai mahasiswa, serta hal-hal lainnya sehingga saya mampu merampungkan skripsi saya.
2. Kedua, terima kasih kepada keluarga saya, Bapak Bobby Bambang Trisulo, Ibu Rumsuhenny, Bang Sultan Gde Alnimitz, atas dukungan moral dan material yang selalu diberikan selama proses pengerjaan skripsi. Tidak lupa pula saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Pakde Johnny, Bude Rini serta Ryan yang selalu membantu saya selama di Bandung.
3. Ketiga, semua dosen HI UNPAR yang telah memperkaya pengetahuan saya, sehingga mampu melancarkan proses penulisan skripsi saya. Mas Albert Triwibowo patut diberikan apresiasi lebih atas kesabarannya ketika membimbing saya, serta seluruh masukan dan arahan beliau yang berhasil menuntun saya untuk merampungkan penelitian ini. Kepada Bang Aknolt Kristian Pakpahan serta Mas Giandi Kartasasmita selaku penguji saya, terima kasih atas kesediannya menjadi dosen penguji. Kritik dan masukan yang diberikan Bang Aknolt dan Mas Giandi telah membuat skripsi saya menjadi lebih baik.
4. Keempat, untuk sahabat-sahabat saya yang sabar dengan saya selama empat tahun masa perkuliahan; Joel Caesar Ongiriwalu, Khalif Rabbani Kusuma, Natanael Alvin, Mardika Parama, Ivan Samuel, Ali Syariati, Rizky Ramadhan, Bang Ichsan, Bang Rahmatzafran, Prayura Senjaya, Jonathan Adrino, Antonius Reynaldo, Sumantra Mararumi, Gugi Amouresna, Shasta Kirana, Tiomas

Gabriella, Pingkan Audrine, Fabiola Chandra, Celine Andrea, Audrie Anitha, Pingkan Febriyanthi, Nadyara Nafisa, Salsa Nayuni, dan Natasha Onggara. Terima kasih bagi kenangannya selama ini.. Bagi teman-teman yang tidak tertera dalam daftar di atas, harap tabah.

DAFTAR ISI

Tanda Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih..	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian	24
1.6.1 Metode Penelitian	24
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7 Kerangka Pembahasan	26
BAB 2: GLOBALISASI NILAI DAN INTEGRASI EKONOMI	27
2.1 Perkembangan Globalisasi.....	27

2.2 Integrasi Ekonomi	31
2.3 Demokrasi	37
2.4 Perdagangan Bebas dan Proteksionisme.....	40
2.4.1 Perdagangan Bebas	40
2.4.2 Proteksionisme	44
BAB 3: TINJAUAN KONDISI POLITIK DAN KEBIJAKAN EKONOMI ARAB SAUDI.....	47
3.1 Tinjauan Kondisi Politik Arab Saudi	47
3.2 Kebijakan Moneter Bank Sentral Arab Saudi.....	53
3.3 Kebijakan Fiskal Arab Saudi	56
3.4 Kebijakan Perdagangan dan Investasi Asing	60
3.4.1 Kebijakan Perdagangan dan Hambatan Dagang.....	60
3.4.2 Ketentuan Investasi Asing dan Hambatan Masuk	64
3.5 Rancangan Megaproyek di Arab Saudi	70
BAB 4: Globalisasi Nilai dan Pengaruh Tradisional di Arab Saudi Menggunakan Teori <i>Late Rentierism</i>	72
4.1 Pengaruh Tradisional dalam Perkembangan Globalisasi di Arab Saudi..	72
4.2 Perjalanan Arab Saudi dari <i>Rentierism</i> menuju <i>Late Rentierism</i>	83
BAB 5: KESIMPULAN	101
DAFTAR PUSTAKA	104

Daftar Tabel

Bab 3:

3.1 Anggaran Belanja Negara dan Realisasi Anggaran 2012-2017.....	58
3.2 Penerimaan Sektor Minyak dan Non-Minyak (dalam ribu USD)	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjadi salah satu isu penting yang menjadi bahasan dalam kondisi politik ekonomi internasional. Dengan menggunakan perkembangan teknologi dan informasi sebagai instrumen, globalisasi dapat menyebarkan nilai-nilai politik dan ekonomi ke seluruh dunia. Sistem pemerintahan demokrasi serta pengimplementasian kebijakan perdagangan bebas sesuai dengan pengaplikasian sistem ekonomi liberal menjadi hal yang umum di era globalisasi.

Perdagangan bebas identik dengan penghapusan hambatan dagang, sehingga impor dan ekspor antarnegara menjadi lebih bebas, sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan. Hal ini dianggap menguntungkan kedua negara, sebab meningkatnya angka impor dapat mendorong terjadinya kompetisi bagi produsen lokal, di mana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Keuntungan komparatif seperti yang dicetuskan oleh David Ricardo dan dikembangkan oleh Heckscher-Ohlin menjadi justifikasi untuk melakukan spesialisasi ekonomi sesuai dengan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. Di sisi lain, peningkatan jumlah ekspor yang diakibatkan oleh perbaikan kualitas dan penambahan nilai produk dapat

berdampak positif pada pertumbuhan GDP dan surplus perdagangan sebuah negara. Dalam konteks global, perdagangan bebas pun diyakini menguntungkan semua pihak akibat kemudahan dalam melakukan perdagangan internasional.

Demokrasi kemudian diyakini turut memberikan insentif dalam pengimplementasian kebijakan pasar ekonomi liberal, seperti yang dijelaskan oleh Milner.¹ Rodrik menambahkan bahwa pergantian rezim juga memiliki peran signifikan dalam mendorong probabilitas terjadinya pengaplikasian kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.² Hal ini diakibatkan oleh resiko politik yang mungkin akan timbul ketika rezim yang baru mengupayakan terjadinya reformasi, sehingga dapat menggoyahkan stabilitas politik di sebuah negara. Proses demokratisasi sebuah negara pun terkadang memerlukan asistensi dari organisasi internasional, meskipun proses transformasi sistem politik pada akhirnya merupakan sebuah upaya nasional.³

¹ Helen V. Milner dan Keiko Kubota, "Why the Move to Free Trade? Democracy and Trade Policy in the Developing Countries," *Journal of International Organization* vol. 59 no. 1, 2005, 108-10.

² Dani Rodrik, 1992.

"The Rush to Free Trade in the Developing World: Why So Late? Why Now? Will it Last?" NBER Working Papers 3947, National Bureau of Economic Research, Inc.
<<https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/3947.html>>

³ International Idea, *The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience*, 39.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Ketika demokrasi dan perdagangan bebas menjadi norma yang didukung oleh mayoritas negara industri, beberapa negara berkembang, dan organisasi internasional, tidak semua negara mampu mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa determinan domestik yang perlu diperhatikan ketika pemerintahan sebuah negara merencanakan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Isu legitimasi politik, kesiapan masyarakat dan pelaku usaha, waktu yang dibutuhkan untuk pelebagaan nilai yang akan diimplementasikan, serta masalah perundangan yang menjadi justifikasi legal atas reformasi tersebut. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan sistem pemilihan umum dan perpajakan, mengenakan kebijakan demikian dapat menuai protes dari rakyat.

Arab Saudi merupakan salah satu negara monarki absolut sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1932. Ketika negara-negara tetangga Saudi mengalami pergantian rezim otoriter menuju pemerintahan yang demokratis, Arab Saudi masih menggunakan sistem negara berbentuk kerajaan. Dibentuknya *Allegiance Council* pada tahun 2007 yang berfungsi untuk mengatur susunan penerus raja dan putra mahkota Arab Saudi semakin menegaskan status Saudi sebagai negara kerajaan.

Kebijakan perdagangan proteksionisme, seperti subsidi, tarif dan kuota impor, *preferential treatment*, dan embargo, merupakan hal yang identik dengan

perekonomian Arab Saudi pada abad ke 20. Kejadian krisis minyak pada tahun 1973 yang disebabkan oleh embargo Arab Saudi dan OPEC kepada negara-negara barat, selain menunjukkan bagaimana pemerintah Saudi dapat menggunakan minyak sebagai ultimatum terhadap negara Barat, juga dapat memperlihatkan bagaimana Arab Saudi belum mengembangkan kebijakan luar negeri yang direncanakan dengan baik. Embargo tersebut memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada keuntungan yang diberikan, sebab setelah dikenakannya embargo minyak, Saudi mengalami penurunan penerimaan dari ekspor minyak dan di saat yang bersamaan harga minyak pun meningkat drastis, sehingga berdampak langsung kepada negara importir minyak dengan daya beli rendah.

Negara berbentuk kerajaan yang tidak demokratis serta kebijakan proteksionisme Arab Saudi yang dominan pada tahun 1970an hingga awal tahun 2000, mulai terkikis perlahan pada sejak dilantiknya raja Abdullah pada tahun 2005. Tren tersebut berlanjut hingga pada tahun 2015, ketika raja Abdullah yang telah meninggal digantikan oleh raja Salman. Meskipun pada saat ini Arab Saudi masih berstatus negara absolut monarki yang otoriter, penulis meyakini adanya penerapan nilai-nilai demokrasi dan perdagangan bebas. Hal ini terlihat dari beberapa hal; pada tahun 2005, diselenggarakan sebuah pemilihan untuk anggota dewan di 178 kota di Arab Saudi, meskipun dewan konsultatif tersebut memiliki kewenangan yang terbatas.⁴ Pemilihan tersebut kembali diadakan pada tahun 2011 dan 2015 di 285 kota, di mana pada pemilihan tahun 2015, perempuan telah

⁴ Andreas Gorzewski, "Saudi Arabia Saw Slow Changes under King Abdullah," *DW*, diakses pada 3 Juli, 2018, <https://www.dw.com/en/saudi-arabia-saw-slow-changes-under-king-abdullah/a-18210371>.

memiliki hak memilih dan diperbolehkan untuk maju sebagai kandidat anggota dewan.⁵ Di sisi lain, berbagai kebijakan proteksionisme seperti hambatan dagang, subsidi, dan aturan investasi asing sedang direformasi di bawah kerangka kerja *Saudi Vision 2030* dan *National Transformation Program*.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Dari isu yang telah dibahas, penulis meyakini bahwa globalisasi merupakan salah satu hal yang mendorong terjadinya berbagai reformasi yang mengarahkan Arab Saudi untuk mengambil kebijakan ekonomi yang lebih liberal dan pemerintahan yang secara perlahan menjalankan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian; “Bagaimana globalisasi mengubah Arab Saudi menuju *Late Rentier State*?”

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada sektor politik dan ekonomi, mengingat fokus dari penelitian ini adalah pengaruh globalisasi bagi proses demokratisasi dan pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih liberal di Arab Saudi, di mana keduanya akan dikaitkan dengan tingkat integrasi Saudi terhadap sistem perekonomian global. Sedangkan untuk ruang lingkup jangka waktu penelitian, tahun 2012 akan dijadikan batas awal dari penelitian, di mana tahun 2017 akan menjadi batas akhir. Penulis menentukan periode 2012 hingga 2017 atas beberapa pertimbangan. Selain ingin memberikan gambaran terhadap

⁵ “Saudi Arabia: Freedom in the World 2014,” *Freedom House*, diakses pada 3 Juli, 2018, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/saudi-arabia>.

transisi raja Arab Saudi pada awal tahun 2015, isu seperti proses adaptasi pemerintah Saudi terhadap rendahnya harga minyak yang terjadi pada pertengahan 2014 pun masuk sebagai bahan analisis, sehingga rentang waktu selama 6 tahun akan mengilustrasikan kedua hal tersebut secara seimbang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) untuk memahami pengaruh globalisasi dalam proses reformasi Arab Saudi menuju negara yang lebih demokratis dan ekonomi yang lebih terbuka, dan 2) untuk memperlihatkan bagaimana teori *Late Rentierism* dapat menjadi salah satu penjelasan terhadap kondisi politik dan ekonomi Arab Saudi saat ini.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 1) memperkaya literatur mengenai kondisi politik ekonomi di kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, dan 2) memberi informasi kepada pembaca mengenai bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi negara otoriter dan atau monarki absolut.

1.4 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa jurnal dan tulisan yang akan digunakan sebagai referensi dalam bagian tinjauan pustaka. Jurnal berjudul “The Rentier State and National Oil Companies: An Economic and Political Perspective” yang ditulis oleh Donald L. Losman mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran NOCs (*national oil companies* atau perusahaan minyak milik negara) sebagai aktor utama dalam *Rentier State*.⁶ NOCs dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kebanggaan sebuah negara, di mana NOCs juga dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Ketika dibandingkan dengan IOCs (*international oil companies* atau perusahaan minyak internasional), NOCs memiliki peran yang berbeda; bergerak atas kepentingan negara dan menjadi badan yang berfungsi untuk menyediakan dana bagi kebutuhan pengeluaran sosial (*social spending*) *Rentier State*. Mengingat peran NOCs yang krusial bagi kelangsungan hidup *Rentier State*, petinggi NOCs pada umumnya ditempati oleh keluarga rezim yang berkuasa, Losman juga berpendapat bahwa semakin besar produksi, pemasukan, serta cadangan minyak suatu negara, maka dampak dari penurunan ekspor maupun harga minyak tidak terlalu berpengaruh terhadap volume investasi yang dilakukan oleh negara (dan atau NOCs).

Untuk menopang argumen Losman, penulis mengkaji tulisan Steffen Hertog dalam jurnal berjudul “*Defying the Resource Curse: Explaining Successful*

⁶ Donald, L. Losman, “The Rentier State and National Oil Companies: An Economic and Political Perspective,” *Middle East Journal* vol. 64, no.3, 2010.

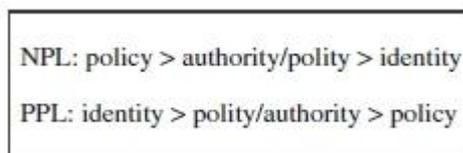
*State-Owned Enterprises in Rentier States.*⁷ Beliau memberikan penjelasan mengenai bagaimana badan usaha milik negara (*State-Owned Enterprise* atau SOEs) Arab di kawasan Teluk mematahkan stereotip defisiensi SOEs. Menggunakan contoh SOEs seperti SABIC (*Saudi Arabian Basic Industries*), Alba (*Aluminium Bahrain*), Emirates Airlines, dan Qatar Industries, Hertog menunjukkan bahwa efisiensi manajemen SOEs merupakan implikasi dari adanya otonomi manajemen harian, orientasi berbasis profit, serta kesamaan visi antara pemerintah dengan SOEs, sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih kepentingan. Selain itu, tingginya pemasukan via *Rents* mengakibatkan negara dapat menanggung biaya operasional tinggi yang diperlukan oleh SOEs ketika berada di fase *economic bust*.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Uriel Abulof, berjudul “‘Can’t Buy Me Legitimacy’: The Elusive Stability of Mideast Rentier Regimes,” mencoba membahas rezim *Rentier State* dari perspektif legitimasi politik domestik dan kaitannya dengan kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat.⁸ Menggunakan konsep *Negative Political Legitimacy* (NPL) dan *Positive Political Legitimacy* (PPL), yang kemudian keduanya dibagi berdasarkan , Abulof memetakan legitimasi negara-negara Arab sebagai *Rentier State* ketika dihadapkan dengan berbagai ancaman yang dapat menggoyahkan rezim otoriter. NPL menitikberatkan terhadap legitimasi politik yang datang dari *tindakan* dan *kebijakan* yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan PPL

⁷ Steffen Hertog, “Defying the Resource Curse: Explaining Successful State-Owned Enterprises in Rentier States,” *Journal of World Politics* vol. 62, no.2, 2010.

⁸ Uriel Abulof, “‘Can’t Buy Me Legitimacy’: The Elusive Stability of Mideast Rentier Regimes,” *Journal of International Relations and Development* vol. 20, 2017.

didefinisikan sebagai kondisi yang melahirkan legitimasi dari *sifat* dan *pembawaan* dari pemerintah atau aktor dominan lainnya. Proses legitimasi keduanya dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Argumen utama beliau adalah perbedaan pandangan mengenai kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat dapat berujung kepada ketidakstabilan politik di suatu negara. Hal ini diperburuk dengan adanya kesadaran masyarakat di *Rentier State* bahwa pemasukan yang didapatkan oleh negara dan kemudian dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk *social spending* tidak diperoleh melalui usaha masyarakat atau rezim yang berkuasa; melainkan dari pemanfaatan lahan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Mengingat sifat *Rents* yang digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, maka Abulof menyimpulkan bahwa *Rents* tidak dapat menghasilkan PPL. Meskipun demikian, kehadiran rezim otoriter dapat memberdayakan *Rents* untuk melahirkan PPL melalui penggunaan politik identitas. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, rezim merupakan sinonim dari negara, yaitu rezim keluarga Saud. Hal tersebut mengakibatkan kuatnya *image* keluarga Saud bagi Arab Saudi, sehingga penolakan legitimasi terhadap rezim Saud juga merupakan penolakan legitimasi terhadap Arab Saudi sebagai sebuah negara. Abulof menambahkan, kondisi yang berbeda-beda di tiap

Rentier State mengakibatkan proses legitimasi NPL maupun PPL yang berbeda-beda.

Martin Hvidt turut berpartisipasi dalam literatur mengenai *Rentier State*, di mana dalam “*Economic and Institutional Reforms in the Arab Gulf Countries*,” beliau mengkaji perihal penggunaan *Dubai Model* sebagai acuan dalam pembangunan di negara Arab kawasan Teluk.⁹ Dibentuknya *Gulf Cooperation Council* (GCC), menurut Hvidt, membuka jalan bagi negara Arab lain untuk mengadopsi model pembangunan Dubai, mengingat tujuan GCC untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Proses diversifikasi ekonomi Dubai dipengaruhi oleh jumlah cadangan minyak yang relatif kecil jika dibandingkan dengan negara GCC lainnya, sehingga memaksa pemerintah Dubai untuk memulai diversifikasi lebih awal. Hal ini didukung oleh argument di mana ketergantungan terhadap pemasukan dari sektor minyak dalam jumlah yang besar dapat memengaruhi minimnya upaya untuk mengembangkan jenis industri baru, terutama industri manufaktur; peralihan dari ekspor minyak yang dianggap sebagai pendapatan non-produktif (ekstraktif) menuju pendapatan produktif (seperti manufaktur, dan industri lain yang berorientasi ekspor).

Dari empat jurnal yang telah dibahas sebelumnya, penulis menawarkan sebuah perspektif baru dalam memperkaya literatur *Rentier State* di kawasan Teluk; memasukkan faktor globalisasi sebagai salah satu determinan penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi, sesuai dengan teori

⁹ Martin Hvidt, “Economic and Institutional Reforms in the Arab Gulf Countries,” *Middle East Journal* vol.65, no.1, 2011.

Late Rentier State. Hal ini diakibatkan oleh paparan informasi yang diterima oleh penduduk Arab Saudi melalui globalisasi dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap peran negara yang alokatif, mengingat mayoritas negara di dunia memiliki peran produktif. Selain itu, globalisasi secara inheren membawa nilai-nilai neoliberalisme, seperti pemberdayaan sektor swasta, membuka akses terhadap investasi asing yang dapat membantu terbentuknya industri-industri baru, serta mendorong terciptanya *comparative advantage*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori *Late Rentierism* yang dirumuskan oleh Matthew Gray sebagai teori utama.¹⁰ Sebagai teori penjelas, teori neopatrimonialisme berfungsi untuk mendeskripsikan kondisi politik Arab Saudi yang identik akan hubungan kesetiaan antara anggota keluarga kerajaan dengan raja Saudi. Untuk sektor ekonomi, teori *state capitalism* akan digunakan untuk menjelaskan sentralnya peran negara dalam ranah ekonomi. Kerangka pemikiran ini akan dimulai dengan penjelasan teori *Late Rentierism*, lalu disusul dengan teori neopatrimonialisme dan *state capitalism*. Kemudian definisi konsep globalisasi akan diletakkan di akhir kerangka pemikiran.

¹⁰ Matthew Gray, *A Theory of "Late Rentierism" in the Arab States of the Gulf*, Qatar: Georgetown University, with help from Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development, 2011.

1.5.1 Teori *Late Rentierism*

Teori *Late Rentierism* merupakan perkembangan dari *Rentier State Theory*, di mana *Late Rentierism* mencoba untuk memberikan pemahaman lebih mendetail terhadap kondisi yang terdapat di *rentier state* pada abad ke-21. Melihat kompatibilitas antara isu yang diangkat penulis dari perkembangan teori tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan teori *Late Rentierism* dengan alasan mencerminkan kondisi yang dialami oleh Arab Saudi pada tahun 2012-2017.

Secara singkat, *late rentierism* adalah negara dengan sistem yang tersentralisasi yang mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar melalui *rents*, seperti perdagangan sumber daya alam dan pemasukan non-produktif lainnya, dan di saat yang bersamaan mengadopsi nilai-nilai yang tidak identik dengan aspek daripada *rentier state*, serta mengaplikasikannya di bidang kebijakan ekonomi, luar negeri, maupun hubungan antara negara dengan masyarakat. Adanya hal yang mendorong *late rentier state* untuk merespons dampak dari globalisasi; munculnya kebijakan ekonomi dan pembangunan yang baru; serta adanya tekanan dari pertumbuhan penduduk dan pengangguran.¹¹

Rentier State Theory dapat diartikan sebagai teori politik-ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan hubungan antara negara dengan masyarakat di negara yang mengandalkan *rents* sebagai pendapatan utama. *Rents* sendiri didefinisikan sebagai royalti atau jenis pemasukan lain yang berasal dari ekspor minyak, gas, dan bantuan luar negeri. Asumsi dasar dari teori ini adalah dengan

¹¹ Matthew Gray, *A Theory of "Late Rentierism" in the Arab States of the Gulf*, Qatar: Georgetown University, 2011, 19.

adanya pemasukan dalam jumlah yang besar dari *rents*, negara hanya mengenakan pajak di taraf yang relatif rendah, atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Selain itu, *Rentier State* juga memberikan berbagai insentif terhadap masyarakat, seperti biaya energi yang lebih murah dan pelayanan sosial yang memadai.

Seiring dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, isu yang dihadapi negara semakin banyak, sehingga *Rentier State* dituntut untuk melakukan serangkaian perombakan dalam sistem pemerintahan. Lebih lanjut, Gray berargumen bahwa fluktuasi harga minyak juga merupakan determinan penting dalam menjelaskan perkembangan *Rentier State*. Turunnya harga minyak menyebabkan *margin* yang didapatkan oleh *Rentier State* dari ekspor energi berkurang, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial karena negara mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan ekspektasi masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, *Rentier State* cenderung memiliki cadangan devisa dengan nominal yang relatif besar untuk mencegah hal tersebut untuk terjadi.

Late rentier state tetap memiliki karakteristik sistem pemerintahan yang tersentralisasi, dengan tujuan untuk mempermudah tugas negara dalam mengalokasikan pendapatan dari *rents*. Meskipun demikian, *late rentier state* mulai mengadopsi nilai-nilai yang menyimpang dari aspek yang terdapat pada RST klasik, dan mengaplikasikannya di ranah kebijakan ekonomi, hubungan luar negeri, dan hubungan antara negara dengan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh perubahan cara pandang negara terhadap penggunaan *rents*; dampak globalisasi

dan bagaimana cara negara merespons isu tersebut; munculnya tuntutan pembangunan dan kebijakan yang perlu dirumuskan ketika pendapatan dari *rents* menurun; serta pertumbuhan populasi dan ancaman pengangguran. Meskipun demikian, upaya perubahan yang dilakukan oleh *Late Rentier State* tidak secara otomatis diartikan sebagai penyerahan kekuasaan ke tangan rakyat

Menurut Gray, globalisasi memainkan peran yang penting bagi *Late Rentier State*, sebab hal tersebut memerlukan dan mendorong adanya respons dari pemerintah. Di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak-dampak lain seperti liberalisasi perdagangan, meningkatnya aliran modal dan investasi sektor swasta, dan adanya prospek yang baik perihal sektor komunikasi dan transportasi. Seiring dengan globalisasi, maka akan muncul berbagai tekanan kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengingat bertambahnya jumlah pekerja asing yang datang.

Poin berikutnya, *Late Rentier State* mengalami perubahan dalam memandang peran negara, pendekatan dalam alokasi *rents*, dan keberlanjutan negara dalam jangka panjang. Bremmer berargumen bahwa negara sebagai aktor dapat mendorong kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui diversifikasi ekonomi dan pendapatan negara, serta menyadari bahwa minyak dan gas merupakan sumber daya dengan jumlah yang terbatas. Negara mulai untuk melihat dari perspektif pembangunan jangka panjang, menyadari kelemahan, dan memformulasikan strategi untuk keberlanjutan negara. Oleh sebab itu, elit politik

di *Late Rentier State* tidak lagi berharap bahwa masyarakat akan mengikuti arahan negara hanya dari alokasi *rents*.

Untuk mempermudah analisis, Gray memberikan tujuh (7) karakteristik dari *Late Rentier State* dengan rincian sebagai berikut:¹²

1) *Responsive but Undemocratic States*

Late Rentier State dapat membatasi proses demokratisasi dari munculnya isu dan fenomena baru yang muncul di abad ke-21, akan tetapi negara harus lebih *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Isu dan fenomena baru tersebut dapat mencakup masalah pengangguran, dan kemungkinan atas adanya ancaman dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang mampu melemahkan otoritas dan legitimasi negara. Pluralisasi politik, seperti kemunculan badan-badan legislatif dan konsultatif dan diselenggarakannya pemilihan umum terbatas menjadi salah satu hal yang cukup umum terjadi di negara Teluk. Akan tetapi, badan legislatif atau konsultatif tersebut tidak memiliki kewenangan yang dapat mengganggu stabilitas rezim. Demokrasi dianggap sebagai ‘hal yang mungkin tidak akan terjadi, bahkan dalam jangka waktu panjang’.¹³ Meskipun demikian, adanya pluralisasi politik dan perspektif baru di bidang politik mengindikasikan adanya kebutuhan bagi *late rentier state* untuk setidaknya *terlihat* terbuka terhadap perubahan, atau bahkan benar-benar

¹² Matthew Gray, *A Theory of “Late Rentierism” in the Arab States of the Gulf*, Qatar: Georgetown University, 2011, 23.

¹³ Gray, *A Theory of Late Rentierism*, 25.

responsif terhadap kebutuhan, pandangan, dan ambisi dari sebuah kelompok masyarakat.

2) *Opening up to Globalisation, but with Some Protectionism Remaining*

Dimulai dengan lambat pada sekitar abad ke-20, *late rentier state* secara perlahan mulai mengadopsi nilai-nilai globalisasi, setidaknya di bidang yang aman dari serangan kaum konservatif dan memberikan keuntungan secara langsung bagi negara, seperti bidang ekonomi. Adanya kecenderungan negara-negara Teluk, meski tidak selalu terjadi, untuk meniru model pembangunan yang didasarkan pada investasi asing, dan keuntungan dari terbukanya jalur perdagangan internasional.

3) *An Active Economic and Development Policy*

Late rentier state memiliki kebijakan ekonomi dengan pendekatan aktif, terutama pada kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, pembangunan, dan berbagai kebijakan sektor ekonomi lainnya. Pada umumnya, berkat peran sentral pemerintah dalam ranah ekonomi dan kompetensi mereka dalam menjalankannya, negara-negara Teluk memiliki kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka. Selain itu, *late rentier state* memiliki serangkaian kebijakan pembangunan jangka panjang yang komprehensif.

4) *An 'Energy-driven' Economy*

Pemasukan sektor minyak dan gas digunakan oleh negara untuk membiayai lahirnya industri-industri baru dalam upaya untuk melakukan

diversifikasi ekonomi. Untuk memastikan bahwa negara dapat menerima pendapatan sektor hidrokarbon secara konstan, maka pelaksanaan dari badan usaha milik negara harus dijalankan secara efisien.

5) *A State Capitalism Structure*

Berkaitan erat dengan teori *state capitalism* yang dibahas di sub-bab berikutnya, struktur *state capitalism* identik dengan pengadaan mekanisme yang mendorong terjadinya investasi asing, serta pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh kemajuan industri ekspor. Negara menjadi aktor sentral dalam memberlakukan perubahan tersebut. Akan tetapi poin krusial dari hal ini adalah seluruh program perubahan di sektor ekonomi yang dijalankan oleh negara, tidak dapat melebihi otoritas negara, atau mengganggu dominasi dan stabilitas rezim.

6) *Long Term in its Thinking*

Dampak yang diakibatkan oleh fluktuasi harga minyak pada periode 1980 hingga awal 2000 dan pada 2014, menuntut *late rentier state* untuk memformulasikan rencana jangka panjang untuk keberlanjutan rezim. Dibentuknya *Sovereign Wealth Funds* (SWFs) merupakan respons rezim negara Arab atas ancaman berkurangnya pemasukan *rents* seiring dengan terbatasnya sumber daya dan ancaman dari volatilitas harga komoditas ekspor. SWFs didefinisikan sebagai dana yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti cadangan devisa negara, surplus perdagangan dan

anggaran tahunan, serta pemasukan dari *rents*.¹⁴ Terdapat beberapa tujuan dari dibentuknya SWFs, yaitu:

- 1) Memberikan *image* kepada masyarakat bahwa rezim yang berkuasa bertindak secara hati-hati dan bijak¹⁵
- 2) SWFs juga dapat bertindak sebagai cadangan dana jangka panjang yang dapat menjadi *safeguard* ketika pemasukan dari sumber daya hidrokarbon menurun¹⁶
- 3) Memperkuat hubungan antara badan usaha milik negara melalui kepemilikan saham yang dikelola melalui SWF¹⁷

7) *Active and Innovative Foreign Policy*

Late Rentier State memformulasikan kebijakan luar negeri yang ‘berkelanjutan dan inovatif’. Kebijakan luar negeri yang ‘berkelanjutan’ dapat dilihat dari kontinuitas hubungan antara *late rentier state* dengan mitra strategis jangka panjang mereka. Sedangkan untuk poin ‘inovatif’, ditandai dengan adanya kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas domestik maupun kawasan, sehingga dapat menarik minat investor asing. Gray menambahkan *late rentier state*

¹⁴ Xu Yi-chong, “The Political Economy of Sovereign Wealth Funds,” in *The Political Economy of Sovereign Wealth*

Funds, eds. Xu Yi-chong and Gawdat Bahgat (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 7-16.

¹⁵ Matthew Gray, *A Theory of “Late Rentierism” in the Arab States of the Gulf*, Qatar: Georgetown University, 2011, 34-5.

¹⁶ “The Vital Role of Sovereign Wealth Funds in the GCC’s Future,” *Middle East Events*, diakses pada 11 Juli, 2018, <http://www.middleeastevents.com/news/page/the-vital-role-of-sovereign-wealth-funds-in-the-gccs-future/6741#.W0XeycJpHiw>.

¹⁷ *Ibid.*

menyadari bahwa pendekatan terhadap kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan kompleks menjadi hal yang krusial dalam jangka panjang.¹⁸

1.5.2 Pluralisasi Politik

Pluralisasi politik dapat didefinisikan sebagai kemunculan aktor politik selain negara.¹⁹ Proses pluralisasi politik diinterpretasikan sebagai perubahan politik yang dapat mempengaruhi peran dari pemerintah dalam sebuah negara. Fenomena seperti adanya kerjasama regional, munculnya otonomi bagi minoritas, berakibat kepada pengikisan daripada konsep ‘negara’ akibat pembagian kekuasaan antara pemerintah dengan hal yang disebutkan.²⁰ Kemunculan aktor politik selain negara, salah satunya diidentifikasi sebagai masyarakat yang mencakup warga negara dan lembaga non-pemerintahan. Kedua aktor tersebut merupakan sumber dari terciptanya tuntutan politik yang diarahkan kepada pemerintah.²¹

1.5.3 Neopatrimonialisme

Teori neopatrimonialisme kerap digunakan untuk menjelaskan kondisi politik yang umum terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa/MENA*). Terdapat banyak penulis yang mencoba untuk mendefinisikan neopatrimonialisme sebagai lanjutan dari patrimonialisme, di antaranya terdapat Bratton, Van de Walle, dan Roth. Dalam tulisannya, Roth

¹⁸ Matthew Gray, *A Theory of “Late Rentierism” in the Arab States of the Gulf*, Qatar: Georgetown University, 2011, 36.

¹⁹ Marcel Wissenburg, *Fragmented Citizenship in a Global Environment*, 74.

²⁰ *Ibid*, 75

²¹ *Ibid*, 76-7.

mendefinisikan salah satu dari jenis dominasi pemerintahan neopatrimonialisme, yaitu *personal rulership*, sebagai “sebuah sistem politik yang identik dengan kesetiaan bawahan terhadap seorang pemimpin yang tidak membutuhkan kepercayaan terhadap karisma atau kepribadian si pemimpin, akan tetapi lebih mementingkan insentif material dan penghargaan, seperti posisi di pemerintahan.”²² Sedangkan Bratton dan van de Walle, menjadi penulis pertama yang mencetuskan istilah ‘neopatrimonialisme’ dan mampu mengidentifikasi jenis dominasi pemerintahan kedua pada neopatrimonialisme, yaitu *legal-rational bureaucracy*.²³

Penulis akan menggunakan teori neopatrimonialisme yang dijelaskan oleh Erdmann dan Engel, mengingat penjelasan yang lebih mendetail dan sesuai dengan dinamika *late rentier state*. Erdmann dan Engel, melanjutkan temuan yang didapatkan oleh penulis-penulis sebelumnya, mampu menjelaskan hubungan antara kedua jenis dominasi pemerintahan neopatrimonialisme; *personal rulership* dan *legal-rational bureaucracy*. Hubungan antara kedua komponen tersebut dideskripsikan sebagai ‘di mana masing-masing komponen saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain’.²⁴ Lebih lanjut, *personal rulership* dapat diartikan sebagai ‘politik informal’ akibat sifatnya yang interpersonal, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Sedangkan *legal-rational bureaucracy* disebut sebagai

²² Günther Roth, “Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States,” *Journal of World Politics* vol. 20, no. 2, 1968, 196.

²³ Michael Bratton dan Nicolas van de Walle, *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 62-3.

²⁴ Gero Erdmann dan Ulf Engel, “Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch-All Concept,” *GIGA Working Paper 16-2006* (Hamburg, GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2006): 18.

‘institusi formal’ mengingat komponen tersebut mencakup hukum dan aturan yang berlaku.²⁵ Kedua komponen tersebut digunakan oleh pemimpin sebagai instrumen untuk tetap mempertahankan stabilitas rezim, dengan mencegah terjadinya kemunculan aktor atau entitas yang dapat menggoyahkan rezim.

Dalam pemerintahan neopatrimonialisme, kekuasaan akan tersentralisasi pada pemimpin, dengan pengikut, seperti elit politik yang setia terhadap pemimpin atas adanya insentif material atau insentif dalam bentuk lain. Kerap terjadi persaingan antara para elit politik, di mana mereka berupaya untuk menjadi penerus dari pemimpin saat ini, atau setidaknya menerima insentif dalam jumlah yang lebih signifikan. Hal ini menunjukkan sisi *personal rulership* dari neopatrimonialisme.²⁶ Sedangkan kecenderungan adanya pemerintahan berdasarkan *legal-rational bureaucracy* di negara yang baru merdeka atau negara monarki lebih kecil dibandingkan negara Barat atau negara industri lainnya, akan tetapi tetap berjalan beriringan dengan *personal rulership*.²⁷

1.5.4 Teori *State Capitalism*

Bremmer merupakan salah satu penulis yang menjelaskan mengenai teori *state capitalism*. Beliau mendefinisikan *state capitalism* sebagai “sebuah sistem di mana negara berfungsi sebagai aktor ekonomi utama dan menggunakan pasar untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik.”²⁸ Lebih lanjut, Bremmer

²⁵ Erdmann dan Engel, “Neopatrimonialism Revisited,” 19.

²⁶ Günther Roth, “Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States,” *Journal of World Politics* vol. 20, no. 2, 1968, 202.

²⁷ Roth, “Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States,” 194.

²⁸ Ian Bremmer, “State Capitalism Comes of Age: The End of the Free Market?” *Journal of Foreign Affairs* vol. 88 no. 3, 2009, 41.

menyatakan terdapat empat aktor utama dalam teori tersebut: 1) badan usaha milik negara; 2) korporasi swasta besar; 3) perusahaan minyak milik negara, dan 4) *sovereign wealth funds* (SWF). Untuk poin terakhir, kemunculan atau kembalinya relevansi SWF yang mulai terjadi pada tahun 2005, terutama di negara berkembang, menarik perhatian negara industri Barat, akibat intensitas aktivitas mereka dalam melakukan investasi.²⁹

Selain menjelaskan sentralnya peran negara dalam ekonomi, keberadaan figur penting dalam korporasi besar, baik swasta maupun milik negara, turut menjadi salah satu poin penting dalam teori ini. Kedekatan hubungan antara pemimpin sebuah negara dengan kepala korporasi-korporasi besar, baik swasta maupun milik negara, dapat dijelaskan dalam dua poin. Pertama, pembuat keputusan dalam bidang ekonomi kerap diserahkan kepada petugas birokrat yang pada umumnya kurang memiliki pengalaman ketika dibandingkan dengan kepala perusahaan. Akibat kedekatan hubungan kepala perusahaan dengan pemimpin negara, keputusan yang dirumuskan akan diformulasikan sedemikian rupa agar menguntungkan sektor komersial. Kedua, kebijakan di bidang ekonomi, selain menguntungkan para perusahaan besar, juga memberikan keuntungan dari segi politik bagi pemerintah, seperti mengamankan suara dari rakyat dari terciptanya stabilitas harga dan kontinuitas pasokan energi.³⁰

²⁹ Bremmer, "State Capitalism Comes of Age," 48.

³⁰ Bremmer, 44.

1.5.5 Definisi Globalisasi

Untuk memahami globalisasi, penulis akan menyampaikan pendapat yang diutarakan oleh beberapa penulis. Harian *The Economist* pada tahun 2009 merilis sebuah artikel yang berargumen bahwa globalisasi adalah sebuah situasi di mana barang dan jasa dipasarkan ke seluruh dunia dengan kualitas yang identik;³¹ menandakan adanya kemungkinan tersedianya barang-barang yang sebelumnya tidak terdapat di suatu kelompok masyarakat. Yueh berargumen bahwa globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah fenomena yang berakar kuat di dunia saat ini, di mana sebuah kelompok masyarakat secara terus menerus mengalami proses keluar masuknya barang, jasa, dan orang melalui komunikasi dan cara-cara lainnya.³² Di sisi lain SustainAbility, sebuah lembaga konsultan, menyatakan bahwa globalisasi adalah “peningkatan kebebasan dalam perpindahan barang, jasa, ide, dan manusia di seluruh dunia.”³³ Hilangnya batasan dan hambatan yang diakibatkan oleh jarak, menurut Cairncross, merupakan salah satu hal penting yang terdapat di setiap proses pembangunan ekonomi global.³⁴

Thomas Friedman dalam bukunya menjelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan globalisasi didorong oleh beberapa hal, antara lain: berkembangnya liberalisasi pasar internasional, sehingga memberi akses terhadap perusahaan multinasional untuk menjangkau pasar potensial lainnya. Berikutnya

³¹ “Globalisation,” *The Economist*, diakses pada 26 Juni, 2018, <https://www.economist.com/news/2009/07/20/globalisation>.

³² Linda Yueh, *The Law and Economics of Globalisation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2009), 1.

³³ Ibid.

³⁴ Frances Cairncross, *The Death of Distance: How Communications Revolution Will Change Our Lives* (Cambridge: Harvard Business School Press, 1997), 28.

bertambahnya pengguna *internet* yang disertai dengan berkurangnya biaya telekomunikasi internasional. Terakhir, peningkatan kekuatan ekonomi negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, dan Brazil. Berkembangnya permintaan domestik di negara-negara tersebut mengakibatkan diperlukannya akses terhadap barang yang berasal tidak hanya dari negara-negara industri, tetapi juga memungkinkan terjadinya perdagangan dengan sesama negara berkembang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, secara umum metode penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dalam penulisan skripsi ini dengan jenis studi kualitatif.³⁵ Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah, “Penelitian yang dimulai dengan adanya asumsi dan penggunaan kerangka kerja interpretatif atau teoretis yang berfungsi untuk menghubungkan antara isu yang terdapat di sekelompok masyarakat dan sebuah permasalahan sosial.”³⁶

³⁵ John H. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design* (London: SAGE Publications), 2013.

³⁶ Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 2013.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah dokumen kualitatif³⁷ yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu studi dokumen, buku, wawancara, dan jurnal-jurnal dari penerbit internasional.³⁸

1) Studi dokumen³⁹

Studi dokumen ini akan mencakup data mengenai ekspor, penerimaan, perdagangan, neraca perdagangan, kondisi politik-ekonomi, pertumbuhan GDP, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan perubahan kebijakan Arab Saudi dari tahun 2011-2017. Data ini akan diperoleh melalui laman situs lembaga-lembaga terpercaya, seperti OPEC, World Bank, OECD, serta rilis resmi dari kementerian terkait, seperti *Saudi Arabia Monetary Authority*, *Saudi Arabia General Investment Authority*, dan Kementerian Finansial (*Ministry of Finance*)

2) Buku dan Jurnal⁴⁰

Berupa buku dan jurnal yang membantu penulis dalam menjelaskan isu yang diangkat oleh penulis, termasuk teori-teori dan konsep. Data ini dikumpulkan melalui kunjungan ke perpustakaan serta penelusuran dari *database* yang ada di *internet*.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (Sage Publications, 2007). 43.

³⁹ *Ibid*, 44.

⁴⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (Sage Publications, 2007). 43.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, dengan rincian Bab I akan memuat pendahuluan, dengan konten seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran. Informasi mengenai globalisasi, serta nilai yang dibawa oleh globalisasi seperti integrasi ekonomi, demokrasi, perdagangan bebas, dan proteksionisme akan termuat pada Bab II. Sedangkan Bab III akan berisi data mengenai kondisi politik dan ekonomi Arab Saudi pada periode 2012-2017. Bab IV akan menganalisis hubungan antara globalisasi dengan kondisi politik dan ekonomi Arab Saudi sebagai *Late Rentier State*.